

IDENTIFIKASI PENGELOLAAN SANITASI PADA KAWASAN PERMUKIMAN PERKOTAAN DI KABUPATEN BANTUL

Amos Setiadi¹

¹Program Studi Magister Teknik Arsitektur, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jl. Babarsari 43 Yogyakarta 55281
Email: amos-s@mail.uajy.ac.id

ABSTRAK

Pelayanan fasilitas sanitasi pada kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Bantul saat ini baru mencapai 83,11% yang terdiri dari 64,18% memenuhi syarat dan 18,44% kurang memenuhi syarat. Dari jumlah yang kurang memenuhi syarat tersebut, sebagian penduduk masih membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase. Kebiasaan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik. Tanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas sanitasi setempat berada pada tingkat keluarga. Sedangkan pemerintah kabupaten Bantul melalui pengelola sektor air limbah Sub Seksi Penyehatan Lingkungan di bawah Seksi Cipta Karya Dinas PU bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan. Di Kabupaten Bantul terdapat fasilitas sanitasi komunal untuk keperluan buang air besar sebanyak 40.607 unit untuk pemakaian bersama dalam lingkup 10 KK per unit, dan untuk pemakaian bersifat umum sebanyak 2.591 unit dalam lingkup pelayanan mencapai 60 KK per unit. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif dan bersifat kualitatif, dilakukan dengan cara pengumpulan data primer dan data sekunder yang mencakup data kependudukan dan data sanitasi di kabupaten Bantul. Data dianalisis dengan mengacu pada pedoman dan peraturan khususnya yang terkait dengan sanitasi dalam lingkup Nasional maupun Daerah. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Temuan dalam studi ini, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas sanitasi dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap fasilitas tersebut menjadi rendah. Untuk keperluan pengolahan air limbah khususnya limbah tinja (IPLT) di wilayah kabupaten Bantul belum tersedia fasilitas pengolahan yang bersifat komunal. Sedangkan fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul sudah tersedia IPAL Sewon, namun sampai kondisi saat ini pelayanannya belum mencakup wilayah Bantul, namun masih sebatas perkotaan untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Kata kunci: *Sanitasi, Kawasan, Permukiman, Perkotaan*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama terkoordinir dari semua tingkatan pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, LSM dan sektor swasta dan didukung oleh kegiatan donor. Sanitasi merupakan salah satu faktor terpenting dalam mewujudkan layanan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, dalam pengembangan kebijakan, perencanaan serta penganggaran. Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 Bidang Permukiman dan Perumahan adalah sebagai berikut¹:

- Terwujudnya kondisi Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) nasional hingga akhir tahun 2014, baik di perkotaan maupun di perdesaan melalui pemecuan perubahan perilaku BABS dengan target sesuai Renstra 2010-2014 masing-masing Kementerian/Lembaga;
- Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi 80 persen rumah tangga hingga tahun 2014;
- Menurunnya luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan;

¹ RPJMN Bidang Perumahan Permukiman, Bappenas

Salah satu target MDGs adalah mengurangi hingga setengah dari jumlah penduduk yang tidak memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi dasar, dengan indikator: a) Proporsi dari populasi yang menggunakan sumber air minum berkualitas, dan b) Proporsi dari populasi yang menggunakan sarana sanitasi berkualitas. MDGs mencanangkan pada 2015 sebanyak 77,2% persen penduduk Indonesia ditargetkan telah memiliki akses air minum yang layak dan minimal 59.1 persen penduduk Indonesia di Kota dan Desa sudah memperoleh pelayanan sanitasi yang memadai (Status Millenium Development Goal Indonesia 2009). Secara nasional, Indonesia telah mencapai target ini, tetapi cakupan ini belum merata dan belum menggambarkan kualitas yang sebenarnya mengenai fasilitas sanitasi tersebut. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kondisi ini, antara lain disebabkan lemahnya perencanaan pembangunan sanitasi, yang ditandai dengan pembangunan sanitasi tidak terpadu, salah sasaran, tidak sesuai kebutuhan, dan tidak berkelanjutan, serta kurangnya perhatian masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat. Sebagai gambaran kondisi sanitasi Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- Penduduk di wilayah Kabupaten Bantul menggunakan air bersih non-perpipaan, sekitar 59 % menggunakan sumber air yang berasal dari sumur dangkal dan sekitar 18 % dilayani oleh PDAM Kabupaten Bantul
- Volume sampah total di Kabupaten Bantul mencapai 2.14 2.04 m³ per hari perharinya, sedangkan volume sampah yang terangkut hanyalah 113,33 m³ hanya 5,29% volume sampah yang dapat terangkut setiap harinya.
- Pengelolaan/pembuangan air limbah di kabupaten Bantul, sebanyak 72,60 % dilakukan melalui sistem *on site* dan sisanya sebesar 27,40% dengan system *offsite*
- Berdasarkan data dari penyusunan DED Drainase Aglomerasi Perkotaan masih terdapat genangan sebesar 0,87 ha untuk kawasan aglomerasi perkotaan.

Hal tersebut menunjukkan masih terdapat gap antara kondisi sanitasi di Kabupaten Bantul dan target capaian pembangunan sanitasi secara nasional. Oleh sebab itu dibentuklah Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai unit koordinasi perencanaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan serta monitoring pembangunan sanitasi dari berbagai aspek. Pokja sanitasi Kabupaten Bantul secara struktural dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 56A Tanggal 25 Januari 2010, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Perkotaan di Kab. Bantul yang diperkuat oleh anggota tim yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKK PP dan KB, dan Kantor PMD.

2. METODOLOGI

Metodologi Studi Identifikasi Pengelolaan Sanitasi di Kabupaten Bantul dijelaskan sebagai berikut :

a. Narasumber

Narasumber Studi Identifikasi Pengelolaan Sanitasi Kabupaten Bantul terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pihak swasta, masyarakat sipil dan tokoh masyarakat.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- Data Primer: Data primer merupakan data yang didapat dari sumber utama secara langsung, data primer ini meliputi catatan atau ringkasan dari hasil wawancara dan potret kunjungan ke masyarakat dan kelompok swasta.
- Data Sekunder: Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari beberapa SKPD dan literatur serta kajian pustaka yang terkait dengan sanitasi, beberapa data sekunder antara lain :
 - Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul
 - Dokumen Rencana Investasi Pembangunan Jangka Menengah Bidang Keciaptakaryaan Kabupaten Bantul.
 - Data persampahan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul.
 - Data Statistik Kabupaten Bantul atau Bantul Dalam Angka.

Untuk mendukung data sekunder tersebut juga dilakukan beberapa survey terkait dengan pengelolaan sanitasi seperti: *Environmental Health Risk Assesment (EHRA)*, Survey peran media dalam perencanaan sanitasi, survey kelembagaan, survey keterlibatan pihak swasta dalam pengelolaan sanitasi, survey *priority setting*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kawasan permukiman di Kabupaten Bantul, Prosentase rumah yang tidak memiliki jamban sebanyak 16,89 % dan yang memiliki jamban sebanyak 83,11% yang terdiri dari 64,18% memenuhi syarat dan sebanyak 18,44% kurang memenuhi syarat. Untuk penyediaan air bersih Prosentase yang tidak memiliki persediaan air bersih adalah sebanyak 10,76%, sedangkan yang memilikipersediaan air bersih sebanyak 19,24% yang terdiri dari 72,74% memenuhi syarat dan 16,50% kurang memenuhi syarat. Prosentase rumah yang tidak memiliki pembuangan sampah sebanyak 14,87 % dan yang memiliki pembuangan sampah sebanyak 85,13% yang terdiri dari 62,45% memenuhi syarat dan sebanyak 22,67% kurang memenuhi syarat. Prosentase rumah yang tidak memiliki sarana pembuangan air limbah adalah sebanyak 23,50%, sedangkan yang memiliki sarana pembuangan air limbah sebanyak 76,50% yang terdiri dari 53,55% memenuhi syarat dan 22,94% kurang memenuhi syarat.

Di kawasan permukiman, penderita DBD dalam 3 tahun terakhir sebanyak 628 orang. Sedangkan untuk penyakit diare meningkat sebanyak 13.958 orang dan jumlah penyakit diare pada balita yaitu sebanyak 3.789 orang. Untuk status gizi balita yang masuk dalam status gizi buruk adalah sebanyak 335 orang dan meningkat menjadi sebanyak 365 orang dan pada tahun terakhir mengalami penurunan sejumlah 307 orang. Kasus gizi yang kurang baik mengalami penurunan yaitu sebanyak 5.294 orang. Jumlah kasus gizi baik terus meningkat sebanyak 42.498 orang. Untuk yang masuk dalam kategori gizi lebih sebanyak 903 orang.

Penyediaan air bersih di Kabupaten Bantul dibedakan atas sistem perpipaan dan non perpipaan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Bantul masih mengandalkan sumur (non-perpipaan) sebagai sumber penyediaan air bersih rumah tangga sehari-hari, Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM Kabupaten Bantul. Pada umumnya penduduk di wilayah Kabupaten Bantul menggunakan air bersih non-perpipaan. Sekitar 59 % menggunakan sumber air yang berasal dari sumur dangkal dan sekitar 17,08 % dilayani oleh PDAM Kabupaten Bantul, sedangkan sisanya sebanyak 23,92% menggunakan sumber lain seperti mata air dan sungai.

Kuantitas air yang disuplai belum mencukupi kebutuhan yang ada. Jumlah Sumber Air Baku ada 20 buah terdiri dari 17 Sumur Dalam, 2 Buah mata Air dan 1 Buah sungai permukaan. Jumlah penduduk yang dilayani oleh sistem air bersih perpipaan dengan sambungan sebanyak 12.797 unit sambungan langganan. Kapasitas produksi terbesar adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bantul diikuti dengan Kecamatan Kasihan. Kecamatan yang belum mendapat fasilitas jaringan PDAM adalah Kecamatan Sanden, Kretek, Pundong, Pandak, dan Jetis.

Pengelolaan air limbah Kabupaten Bantul adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, sedangkan untuk IPAL Sewon pengelolaannya adalah oleh Unit Pengelola IPAL (UPIPAL) UPT di bawah Koordinasi Bidang Cipta Karya Kimpraswil Propinsi DIY

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Bantul menggunakan sistem setempat (*on-site system*), yaitu sistem penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara individual/komunal dengan fasilitas dan pelayanan dari satu atau beberapa bangunan yang pengelolaannya diselesaikan secara setempat atau di lokasi sumber dan sistem terpusat(*off-site system*) adalah sistem penanganan air limbah domestik melalui jaringan pengumpul yang diteruskan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Sistem setempat menggunakan cubluk, septiktank, atau sumur resapan untuk pembuangan air limbah. Sistem terpusat menggunakan jaringan pipa untuk mengalirkan air limbah dari sumber menuju instalasi pengolah air limbah (IPAL) di Pendowoharjo, Sewon, Bantul. Seiring berjalannya waktu, pembangunan sarana prasarana air limbah telah dilakukan di beberapa kecamatan, seperti pembangunan IPAL Komunal Segoroyoso dan Trimulyo di Kecamatan Pleret dan Jetis. SR Krapyak di Kecamatan Sewon sebanyak 650 unit.

Volume sampah total di Kabupaten Bantul mencapai 2.327,33 m³ perharinya, sedangkan volume sampah yang terangkut hanya 113,33 m³ (4,87%). Untuk mengatasi masalah sampah tersebut, di Kabupaten Bantul terdapat Bank Sampah yang telah diresmikan pada tahun 2009, yang terletak di Badekan dan dikelola oleh masyarakat. Arah pengelolaan sampah berbasis komunitas dapat dikembangkan di Kabupaten Bantul sebagai pendukung bidang permukiman. Tidak semua sampah dari sumber sampah diangkut ke tempat pengolahan akhir (TPA), masih banyak pengelolaan sampah secara individu yang dilakukan dengan cara dibakar, dikubur, dan dibuang ke badan air.

Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Piyungan terletak di Kabupaten Bantul, ± 16 km sebelah tenggara pusat Kota Yogyakarta. Tepatnya di Dusun Ngablak, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Pembangunan TPA ini dilakukan pada tahun 1992 dan mulai dioperasikan tahun 1995 di atas tanah seluas 13 hektar dengan kapasitas 2,7 juta meter kubik sampah. Masa penggunaannya diperkirakan mencapai 10 tahun, dengan asumsi Prosentase daur ulang 20%. Apabila Prosentase daur ulangnya dapat ditingkatkan menjadi 50% maka masa penggunaannya bisa mencapai 13 tahun. TPA Piyungan di bangun dalam tiga tahapan, tahap I dengan kapasitas sampah sebesar 200.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2000. Tahap II dengan kapasitas sampah sebesar 400.000 meter kubik yang berakhir pada tahun 2006 dan tahap III dengan kapasitas sampah sebesar 700.000 meter kubik pada tahun 2014.

TPA Piyungan merupakan titik akhir pembuangan sampah yang dihasilkan warga tiga wilayah di Yogyakarta yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, yang dalam seharinya bisa mencapai 200-300 ton sampah. TPA ini dikelola melalui Sekretariat Bersama Yogyakarta, Sleman, Bantul (SEKBER KARTAMANTUL)

yang memfasilitasi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul dalam berkoordinasi dan menentukan kebijakan yang akan diambil dalam pengelolaan sampah di TPA Piyungan. Dasar hukum dari kerjasama antar pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam perjanjian Nomor: 07/Perj/Bt/2001, 05/PK.KDH/2001, dan 02/PK/2001 tentang Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Piyungan Kabupaten Bantul. Perjanjian kerjasama ini dibuat atas dasar saling membantu dan menguntungkan dalam pengelolaan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana TPA dengan tujuan agar pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan TPA dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta memenuhi standar teknis lingkungan.

Pengelolaan sampah di TPA Piyungan menggunakan metode pengolahan *sanitary landfill*, yaitu dengan membuang dan menumpuk sampah ke suatu lokasi yang cekung, memadatkan sampah setelah ketinggian sampah mencapai 40 cm dan kemudian menutupnya dengan tanah. Idealnya sampah yang masuk ke dalam *sanitary landfill* adalah sampah organik, yaitu sampah yang dapat terurai, sehingga dapat mempercepat proses komposisi. Namun seiring berjalannya waktu, proses pengolahan sampah di TPA Piyungan berubah menjadi *control landfill* karena dalam pengelolaan sampah ini, di TPA Piyungan tidak dilakukan pemisahan antara sampah organik dan anorganik. Pemilahan sampah-sampah tersebut hanya dilakukan para pemulung di sekitar TPA, itu pun sampah yang memiliki nilai ekonomi atau bisa dijual kembali. Jika sudah tidak memiliki nilai ekonomis, sampah-sampah tersebut menjadi makanan untuk ratusan ekor sapi dan domba milik penduduk setempat yang digembala di sekitar lokasi TPA Piyungan. Selain itu di TPA Piyungan juga terdapat kolam pengelolaan *leachate* atau lindi, pipa pengendali gas buang, sistem drainase dan lapisan kedap air. Dengan penutupan sampah yang dilakukan secara periodik bisa untuk meminimalisasi potensi gangguan lingkungan.

Pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk yang cepat menimbulkan tekanan terhadap ruang dan lingkungan untuk kebutuhan perumahan kawasan jasa/industri yang selanjutnya menjadi kawasan terbangun. Kawasan permukiman perkotaan yang terbangun memerlukan adanya dukungan prasarana dan sarana yang baik yang menjangkau kepada masyarakat berpenghasilan menengah dan rendah. Perkembangan perumahan dan permukiman yang sangat pesat sering kurang terkendali dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang maupun konsep pembangunan yang berkelanjutan, mengakibatkan banyak kawasan-kawasan rendah yang semula berfungsi sebagai tempat parkir air dan bantaran sungai dihuni oleh penduduk. Kondisi ini akhirnya meningkatkan volume air permukaan yang masuk ke saluran drainase dan sungai. Hal-hal tersebut di atas membawa dampak rendahnya kemampuan drainase mengeringkan kawasan terbangun, dan rendahnya kapasitas seluruh prasarana pengendali banjir (sungai, polder-polder, pompa-pompa, pintu-pintu pengatur) untuk mengalirkan air ke laut.

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam penanganan drainase antara lain menurunnya perhatian pengelola pembangunan bidang drainase khususnya mengenai masalah operasi dan pemeliharaan, pola pikir dan kesadaran masyarakat yang rendah akan lingkungan hidup yang bersih dan sehat dan lemahnya institusi pengelola prasarana dan sarana drainase dan ketidak mampuan untuk menyusun program yang dibutuhkan. Dalam penanganan drainase perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menimbulkan permasalahan, salah satunya berupa masalah genangan air. Pada saat ini banyak terjadi masalah genangan air yang pada umumnya disebabkan antara lain karena prioritas penanganan drainase kurang mendapat perhatian, kurangnya kesadaran bahwa pemecahan masalah genangan harus melihat pada sistem jaringan saluran secara keseluruhan yang mengakibatkan hambatan (*back-water*) dan beban saluran dari hulunya, tidak menyadari bahwa sistem drainase kawasan harus terpadu dengan sistem badan air regionalnya (*system flood control*), kurang menyadari bahwa pemeliharaan (pembersihan dan perbaikan) saluran merupakan pekerjaan rutin yang sangat penting untuk menurunkan resiko genangan, belum optimalnya koordinasi antara pihak terkait agar sistem pengaliran air hujan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data dari penyusunan DED Drainase Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta yang ada di aglomerasi perkotaan untuk kabupaten Bantul adalah seluas 0,87 Ha (10 lokasi genangan). Penyebab genangan yang paling umum adalah kapasitas saluran yang kurang memadai

Di Kabupaten Bantul terdapat 202 unit industri besar/ sedang yang tersebar di 16 kecamatan. Jumlah industri kecil yang ada di Kabupaten Bantul tercatat sebanyak 17.911 unit. Industri di Kabupaten Bantul bergerak dalam bidang pengolahan pangan, sandang dan kerajinan kulit, kerajinan umum (handycraft), kimia dan bahan bangunan, kerajinan logam dan sektor jasa, serta industri rokok.

Untuk penanganan limbah industri kecil di kawasan permukiman diupayakan dengan membangun instalasi pengolahan di sumber/lokasi kegiatan tersebut. Pembangunan sarana instalasi pengolahan menjadi tanggung jawab pemrakarsa kegiatan. Pemerintah bertugas membimbing, membina dan mengawasi hasil olahan (*effluent*) sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Dalam upaya bimbingan tersebut Pemkab Bantul telah membangun unit instalasi limbah percontohan, yaitu IPAL industri tahu di Srandakan, IPAL industri Tapioka di Pundong, IPAL industri kulit di Piyungan. Baru sebagian kecil industri yang mengolah limbahnya karena keterbatasan dana serta kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan limbah.

Berdasarkan data RPIJM Kabupaten Bantul kurang-lebih 72,6% penduduk telah terlayani melalui sistem *on site* dan *off site*, sisanya menggunakan MCK komunal atau langsung dibuang ke sungai. Untuk yang tidak mempunyai fasilitas jamban menggunakan MCK atau langsung dibuang ke sungai. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pelayanan pengurusan tanki septik atau

cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. Biasanya lumpur dari tangki septik/cubluk baru disedot kalau fasilitasnya sudah buntu (dan sudah lama tidak berfungsi). Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL, tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan.

Tahun 2010 IPAL di Pendowoharjo, Kecamatan Sewon kapasitas ditambah untuk melayani sebanyak 650 SR. Untuk Offsite, dibangun IPAL Komunal sebanyak 4 buah di Jetis dan 2 buah di Trimulyo untuk melayani sekitar 100 KK dapat mengolah *Black Water*. Tahun 2010 ada penambahan 10 unit di Ponggol dan Segoroyoso untuk melayani 700 KK dan IPAL ini dapat mengolah *Black Water* dan *Grey Water*.

Pelayanan fasilitas sanitasi individu untuk buang air besar penduduk Kabupaten Bantul sebanyak 83,11% yang terdiri dari 64,18% memenuhi syarat dan sebanyak 18,44% kurang memenuhi syarat. Untuk yang tidak mempunyai fasilitas jamban menggunakan MCK atau langsung dibuang ke sungai. DPU Kabupaten Bantul memiliki satu truk tinja yang melayani penyedotan tinja disekitar perkotaan Bantul. Rata-rata penyedotan 3 (tiga) kali seminggu, tarif Rp 30.000,- sekali sedot, dengan volume sekitar 3 m³ tiap ritnya. Hasil penyedotan tinja dibuang ke IPAL Pendowoharjo Sewon.

Ada tiga jenis fasilitas buang air besar di Kabupaten Bantul:

1. Jamban leher angsa yang langsung dialirkan menuju tangki septik. Efluen dari tangki septik dialirkan ke bidang resapan dimana efluen tersebut meresap ke dalam tanah.
2. Jamban *plengsengan* yang langsung dialirkan ke bidang resapan.
3. Jamban cubluk pribadi (cemplung terbuka). Limbah rumah tangga khususnya dari WC dialirkan langsung ke bidang resapan.

Sebagian besar penduduk kabupaten Bantul memakai fasilitas buang air besar dengan jamban leher angsa. Sementara itu ada sebagian yang membuang limbah air mandi, cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. Akan tetapi, kebiasaan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sanitasi yang baik, dan oleh karena itu kebiasaan ini harus ditinggalkan.

Tanggung jawab terhadap pembangunan fasilitas sanitasi setempat berada pada tingkat keluarga. Sedangkan pemerintah kabupaten Bantul melalui pengelola sektor air limbah Sub Seksi Penyehatan Lingkungan di bawah Seksi Cipta Karya Dinas PU bertugas melaksanakan perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang teknik penyehatan yang meliputi urusan-urusan air bersih, air buangan, kebakaran, kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.

Di Kabupaten Bantul terdapat fasilitas sanitasi komunal untuk keperluan buang air besar sebanyak 40.607 unit untuk pemakaian bersama dalam lingkup 10 KK tiap unit, dan untuk pemakaian bersifat umum sebanyak 2.591 unit dalam lingkup pelayanan mencapai 60 KK tiap unit. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Dalam hal ini, masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas tersebut dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawab masyarakat terhadap fasilitas tersebut rendah. MCK, yang dikenal sebagai WC Umum, juga dibangun di tempat-tempat umum seperti pasar dan terminal. MCK biasanya terdiri dari tempat mandi, Cuci dan kakus. Air limbah disalurkan ke tangki septik yang menyalurkan ke bidang resapan. Pengurusan tangki septik secara rutin penting agar proses pengolahannya berjalan dengan baik. Untuk keperluan pengolahan air limbah khususnya limbah tinja (IPLT) di wilayah kabupaten Bantul belum tersedia fasilitas pengolahan yang bersifat komunal. Sedangkan fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul sudah tersedia di lokasi IPAL Sewon, namun sampai kondisi saat ini pelayanannya belum mencakup wilayah Bantul karena masih sebatas untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman.

Pelayanan sanitasi sistem terpusat dilakukan dengan menggunakan jaringan pipa induk air limbah yang menuju IPAL Sewon. IPAL Sewon terletak di Kabupaten Bantul, 6 km sebelah barat daya pusat Kabupaten Bantul, dengan luas lahan 6,7 Ha. Cakupan pelayanan khusus Kabupaten Bantul meliputi daerah antara Sungai Code dan Winongo sebagai batas barat dan timur dan batas Kota Yogyakarta sebagai batas utara dan selatan dan beberapa wilayah disebelah Timur Kali Code: yaitu Kelurahan Terban, Baciro, Tegal Panggung, Lempuyangan, Bausasran, Purwokinanti, Gunungketur, Wirogunan, Semaki, Tahunan, Sorosutan, dan Giwangan.

Berikut ini disajikan beberapa kondisi operasional pelayanan IPAL Sewon :

1. Kapasitas (desain) pengolahan :
 - Pelayanan 110.000 penduduk,
 - Sambungan rumah tangga 17.330 unit,
 - Sambungan non rumah tangga 4.360 unit,
 - Kapasitas pengolahan 15.500 m³/hari,
 - Debit puncak 356 L/detik.
 - IPAL Sewon dioperasikan dengan efisiensi pengolahan yang tinggi (95%).
 - Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain, yaitu 10.000 pelanggan dari kapasitas desain sebesar 18.400 pelanggan.
 - Pelayanan IPAL akan ditingkatkan secara bertahap sampai tahun 2012 melayani 59 % wilayah perkotaan Yogyakarta atau 273.000 penduduk (53 % penduduk kota)

2. Potensi (Produk) IPAL yang bisa dimanfaatkan
 - Air hasil pengolahan (bagus untuk pertanian dan perikanan) 15.500 m³/ hari
 - Pupuk / pengembur tanah (soil conditioner 300 – 600 m³/ tahun)
 - Pelayanan pembuangan air limbah
 - 17.330 sambungan Rumah Tangga
 - 4.360 sambungan non Rumah Tangga
 - Pelayanan pembuangan Tinja (dengan truk tangki 422 tangki)
 - Wisata Pendidikan
3. Cakupan pelayanan IPAL Sewon seluas 1220 Ha, meliputi seluruh Kabupaten Bantul, sebagian Kabupaten Bantul bagian selatan (5 Kecamatan) dan sebagian Kabupaten Bantul bagian utara (3 Kecamatan):
 - Daerah timur Sungai Winongo dan Sungai Code di sebelah barat dan timur, dengan batas kota di sebelah utara dan selatan,
 - Beberapa wilayah di sebelah timur Sungai Code yaitu Kel. Tegal Panggung, lempuyangan, Bausasran, Terban dan Baciro,
 - Komplek UGM, Catur Tunggal, Depok, Sinduadi dan Kec. Melati,
 - Kec. Kasihan, Sewon dan Wil. Kab. Bantul bagian utara.

Kondisi Umum Pengelolaan Limbah Cair

1. IPAL yang terletak di Sewon penggunaannya lebih banyak untuk masyarakat dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, untuk Kabupaten Bantul masih belum banyak yang memanfaatkan,
2. Limbah cair rumah tangga lebih banyak dikelola secara individu,
3. Beberapa lokasi sudah ada yang membuat IPAL Komunal bantuan dari berbagai pihak seperti di Srandakan (sentra industri tahu)
4. Peran Serta Masyarakat Dan Gender Dalam Penanganan Limbah Cair

Permasalahan yang dijumpai yaitu:

1. Bentuk kelembagaan IPAL Sewon setingkat UPT dinilai masih lemah dalam hal otoritas
2. IPAL yang terletak di Sewon penggunaannya lebih banyak untuk masyarakat dari Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta, untuk Kabupaten Bantul masih belum banyak yang memanfaatkan,
3. Belum ada Masterplan mengenai Air limbah
4. Prasarana dan Sarana Sanitasi Berbasis masyarakat terbatas
5. Kapasitas IPAL Sewon saat ini baru dimanfaatkan sekitar 50% dari kapasitas desain
6. Sumber pembiayaan terbatas
7. Retribusi dari air limbah masih sangat kecil
8. Belum ada Perda yang sesuai dengan kondisi saat ini
9. Kesadaran masyarakat kurang

Di gunung saren kidul, desa trimurti, kecamatan Srandakan terdapat kurang lebih 55 pengrajin tahu. Rata-rata memproduksi 50 kg/hari Pengelolaan air limbah lebih banyak dilakukan oleh kaum pria. Ada beberapa IPAL untuk industri tahu, yaitu 9 unit IPAL yang bisa dimanfaatkan juga untuk bahan bakar biogas. IPAL tersebut didapat dari kerjasama dengan LPTP pada tahun 2006 (1 unit), UGM (1 unit), BPK (2 unit), pemerintah daerah (4 unit), serta SANIMAS (1 unit). Pada proses pembuatan IPAL tersebut yang terlibat dalam proses perencanaannya adalah kaum pria, kaum wanita hanya berperan dalam penyediaan konsumsi pada saat rapat pertemuan saja, Peran serta masyarakat dan gender dalam penanganan limbah cair di Kabupaten Bantul dalam pengolahan air limbah dapat di kategorikan sebagai berikut :

- Bagi masyarakat yang sudah sadar dan mampu secara finansial untuk penanganan limbah cair tidak mengalami kesulitan, artinya secara teknis dan kebutuhan sarana prasarana dapat secara langsung disediakan oleh pemrakarsa.
- Bagi masyarakat yang belum sadar dan mayoritas tidak mampu (secara finansial) sangat sulit untuk penanganan limbah cair di lingkungannya hal ini keterbatasan akan kesadaran dan biaya yang harus dikeluarkan.

4. KESIMPULAN

Sesuai aspek-aspek pendukung yang terkait dengan pengelolaan sanitasi, antara lain bidang perencanaan, kesehatan, keciptakarya, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup, maka langkah langkah yang harus dilakukan mencakup :

- a) Meningkatkan upaya lingkungan yang sehat dan perilaku hidup bersih serta sehat dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- b) Meningkatkan kapasitas sistem, organisasi dan individu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat;
- c) Mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan air limbah, persampahan dan drainase Kabupaten Bantul dengan perencanaan penataan ruang Kabupaten Bantul;
- d) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan pembangunan air limbah, persampahan dan drainase dengan meningkatkan ketegasan sanksi dalam mengoptimalkan saluran drainase;
- e) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana sanitasi dengan menyusun strategi sanitasi kabupaten;
- f) Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana air limbah, persampahan dan drainase dalam skala komunitas;

Dari aspek tersebut, diaplikasikan dalam beberapa masukan penanganan prioritas, antara lain :

- a) Meningkatkan cakupan perilaku hidup bersih dan sehat
- b) Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi;
- c) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur sanitasi;
- d) Menyusun masterplan air limbah, persampahan dan drainase;
- e) Meningkatkan kegiatan 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*) berbasis masyarakat, mulai dari skala rumah tangga sampai ke TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu)
- f) Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih;

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bantul yang telah memberi kesempatan dalam Penyusunan Dokumen SPPIP (Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan) Kabupaten Bantul.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
PP Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kepmen LH Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik.
Kepmenkes Nomor 1205/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA).
RPJMN 2010-2014
MDGs Indonesia 2009